

# Mencermati Keberadaan *ASEAN CHARTER*

Agenda Neoliberalisme  
di Asia Tenggara 2015?

**Ikhsan Ahmad**

*Riuh rendah Asean Charter yang ditandatangani Presiden SBY pada November 2007 dan setahun kemudian diratifikasi DPR RI kini sunyi senyap. Tenggelam dalam gegap gempita politik pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2009.*

*Padahal implikasi pelaksanaan Piagam Asean ini 7 tahun lagi bukan tidak mungkin menimbulkan dampak kemiskinan luar biasa serta hilangnya kedaulatan bangsa. Kekuatan asing dapat menentukan mau diapakan kekayaan yang ada di dalam laut maupun bumi Indonesia.*

*Mungkin di saat itulah kesadaran muncul, betapa neoliberal dan upaya penegakannya tidak sejalan dengan cita-cita ekonomi kerakyatan Indonesia.*

**A**sean Charter adalah Regionalisasi negara-negara Asia Tenggara melalui proses "Top-Down". Kesepakatan yang akan diambil adalah melalui mekanisme konsultatif dan konsensus, diputuskan oleh elit negara-negara anggota dalam Konferensi Tingkat Tinggi. Karakter-

yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi". *Asean Summit* di Bali, 2003, menetapkan tiga pilar guna merealisasikan visi Asean, yaitu: *Asean Economic Community (AEC)-MEA*, *Asean Security Community*, *Asean Socio-Cultural Community*. Namun keberperanan Asean dengan konstelasi institusi regional lainnya lemah, terutama dengan *power shift* di Asia Timur, NAFTA, Uni Eropa, berlanjutnya supremasi AS, kebangkitan China dan India, kehadiran Jepang dan kembalinya Russia. Artinya, dengan adanya kawasan perdagangan bebas regional lain sudah pasti meningkatkan hambatan bagi peserta di luar kawasan untuk ikut serta. Dengan demikian bukan tidak mungkin terjadi kebekuan dalam perdagangan multilateral.

Di Asean juga belum ada pemimpin kawasan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan sistemik dan dapat memperlambat gerak integrasi. Kekuatan tiap-tiap negara di Asia Tenggara hampir merata meski dalam beberapa segi ada kesenjangan di

dalamnya. Semua negara bergerak linear sesuai kepentingan nasional masing-masing. Pada masa Soeharto berkuasa, Indonesia dituakan di Asean, namun kini tak bertaring. *World Economic Forum* tahun 2003-2004 melaporkan daya saing Indonesia menduduki peringkat ke 37 pada tahun 1999, turun menjadi 44 tahun 2000, menurun lagi ke urutan 49 tahun 2001, merosot ke urutan 69 di tahun 2002 dan pada tahun 2003 mencapai peringkat terendah menjadi ke 72. Di sini terlihat bahwa daya saing Indonesia terus merosot terutama bila dibandingkan dengan negara-negara Asean. Di tingkat Asean, Singapore pada tahun 2003 dan 2002 ada di peringkat 6, Malaysia 2003 di urutan 29 turun dari 27 tahun 2002. Thailand tahun 2003 ada di urutan 32 turun dari peringkat 30 di tahun 2002, sementara Vietnam ada di peringkat 60 tahun 2003 dan menurun dari 56 di tahun 2002. Philipina ada di peringkat 66 tahun 2003 turun dari peringkat 62 di tahun 2002. Sementara itu *World Economic Forum* 2006-2007, melaporkan:

## Peringkat Daya Saing Oleh WEF

Negara		Peringkat		
		2005	2006	2007
Indonesia	4	69	54	54
Singapura	1	5	8	7
Malaysia	2	25	19	21
Thailand	3	33	28	28
Filipina	5	73	75	71
Vietnam	6	74	64	68
Kamboja	7	111	106	110

WEF, global Competitive Report 2006&amp;2007

Posisi daya saing Indonesia berada di bawah jika dibandingkan Malaysia, Thailand dan Singapura. Tingkat Produktivitas Indonesia rendah. Padahal produktivitas faktor penentu tingkat daya saing dan sumber standar hidup serta sumber pendapatan individual maupun per kapita. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya tingkat kemakmuran (daya saing) untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan kesejahteraan. Jadi ada hubungan antara tingkat produktivitas dan tingkat daya saing, di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan usaha pada tingkat peru-

sahaan merupakan sumber penciptaan lapangan kerja dan sekaligus sumber kesejahteraan. Dalam konteks tersebut, perekonomian Indonesia sangat rentan gejala krisis ekonomi regional dan global. Pertumbuhan ekonomi yang dijalankan melalui peningkatan investasi (terutama dari pemodal asing) untuk menciptakan lapangan kerja, pendapatan bagi masyarakat serta menciptakan dampak berantai (*multiplier effect*) tidak disertai dengan efisiensi ekonomi, pengembangan potensi SDM dan kepastian hukum, di samping masalah korupsi yang akut.

## Krisis dan Ketahanan Ekonomi Indonesia

Krisis ekonomi di Asia Tenggara 1997, membuktikan Malaysia lebih tahan gejolak. Thailand mampu segera bangkit. Sementara Indonesia belum bisa keluar dari krisis. Meski nanti, kawasan ekonomi bebas bisa menimbulkan kekuatan ekonomi super besar, perlu diperhatikan kondisi perekonomian masing-masing negara. Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita paling tinggi, yakni berkisar US \$ 30.214. Sementara beberapa negara anggota Asean lain, seperti Myanmar dan Indonesia pendapatan per kapitanya masing-masing US \$ 208 dan US \$ 1.604 (di bawah pendapatan per kapita rata-rata negara Asean yang berkisar US \$ 1.890). Dengan gambaran tersebut, kesenjangan bakal menjadi kendala. Contoh, Indonesia belum memiliki kesiapan industri domestik. Sedangkan setiap negara Asean bebas menjual produknya ke Indonesia tanpa tarif (pajak) maupun non tarif (quota, standar produk) namun berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan terhadap produk yang berkualitas, harga yang murah dan preferensi konsumen. Dengan demikian, jika perekonomian Indonesia

tidak efisien maka tidak akan diminati pasar. Jika kondisi ini terjadi pada 2015 maka perekonomian Indonesia akan "tertindas" oleh negara lain. Perekonomian negeri ini akan menjadi kawasan konsumsi produk-produk yang dihasilkan di negara lain.

Industrialisasi juga berfungsi menyerap angkatan kerja. Jika industri yang dibangun di Indonesia sepenuhnya mengambil tenaga kerja asing karena SDM-nya dianggap lemah (dan itu sah dalam *Asean Charter*) maka kesempatan kerja yang ada di dalam negeri tidak mampu menyerap angkatan kerja. Padahal pengangguran di Indonesia cenderung meningkat. Tertinggi di Asean, yaitu 10,5 persen (2005/2006), Malaysia hanya 3,0 persen. Thailand 1,3 persen. Dampaknya angka kemiskinan tinggi. Sentralisasi peran produksi (khususnya industri) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tantangan berat bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan industri domestik maupun asing. Apabila membaca kondisi perekonomian Indonesia saat ini, maka sedikit pesimis untuk bisa bersaing di kancah Asean yang tersisa 7 tahun lagi. Perekonomian Indonesia sebagian besar masih didorong oleh sektor konsumsi (*con-*

*sumption driven of economy*), terindikasi dengan pangsa pada PBD sekitar 65 persen. Sementara komponen pendorong pertumbuhan ekonomi lain salah satunya adalah investasi hanya menyumbang sekitar 20 persen. Pangsa konsumsi pada pertumbuhan ekonomi terlalu besar, meski berdampak baik secara jangka pendek namun pangsa investasi, khususnya fisik berperan terlalu sedikit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Belum lagi dengan berkurangnya penyerapan angkatan kerja karena kebutuhan tenaga kerja oleh sektor industri tidak mengalami peningkatan signifikan. Mampukah industri Indonesia bersaing dengan industri dari Vietnam, Kamboja, dan Malaysia? Dan, masih banyak pertanyaan lain. Kenyataannya, potret daya saing industri kurang menggembarakan. Pertanian dan perikanan kurang perhatian, produk berbasis kayu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Di bidang sosial budaya masih tampak kedodoran dalam menangani masalah-masalah kemiskinan, kesetaraan, dan pembangunan manusia. Sumber daya manusia yang kompetitif dan sistem perlindungan sosial yang memadai untuk mengelola dampak sosial dan integrasi ekonomi tidak terbangun dengan baik.

Krisis multidimensi 1997, di Indonesia tampaknya hendak dijadikan pelajaran bagi Asean terhadap dampak krisis yang saling keterkaitan. Oleh karenanya dalam Piagam Asean diatur prinsip-prinsip pokok yang harus ditegakkan, sistem dan mekanismenya, organ-organ apa saja yang akan ada dan bagaimana strukturnya, dan lain-lain. Piagam ini hendak dijadikan fondasi dari komunitas politik dan keamanan. Kendati demikian, bagi banyak negara Asean, termasuk Indonesia, pengikatan kepada Piagam Asean itu bukanlah soal yang mudah karena dalam beberapa hal bermakna "dialihkannya sebagian dari kedaulatan" kepada kepentingan bersama Asean.

### Neoliberalisme di Indonesia

Pengertian neoliberalisme menunjuk pada kemenangan sistem ekonomi liberalisme 30 tahun terakhir. Terutama saat Uni Soviet dan negara-negara penganut sosialis bertumbangan satu-persatu dan mengubah haluan sistem ekonominya secara berbarengan menjadi penganut neoliberalisme, yang kebetulan cukup sukses mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negerinya. Karenanya, neoli-

beralisme dianggap sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling "berhasil". Neoliberalisme mengacu pada teori ekonomi neoklasik yang menekankan berlakunya mekanisme pasar bebas dalam suatu pasar persaingan sempurna, tanpa ada intervensi pemerintah. Penganut sejati neoliberalisme utamanya adalah AS, sangat getol melakukan perluasan pasar di luar negeri, baik melalui diplomasi politik, tekanan ekonomi maupun intervensi militer. Melalui berbagai kartel dan komparadornya, seperti WTO, Bank Dunia, dan IMF, AS secara sistemik berupaya meniadakan intervensi pemerintah di berbagai negara dalam pengelolaan ekonomi dan sumberdaya serta pelayanan publik hingga mencapai titik nadir.

Bagi neoliberalisme, pelayanan publik yang diselenggarakan negara harus menggunakan prinsip untung-rugi. Subsidi harus dihapuskan (dianggap pemborosan dan inefisiensi) walaupun akan berdampak kesengsaraan bagi rakyat. Neoliberalisme menolak kebijakan pemberian hak-hak buruh dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan upah buruh. Besaran upah buruh ditentukan oleh mekanisme pasar tenaga-kerja,

bukan oleh kebijakan pemerintah. Agenda lain neoliberalisme adalah pemaksaan sistemik di negara-negara boneka neoliberalisme untuk melakukan privatisasi perdagangan dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.

Neoliberalisme mendunia pada akhir tahun 80-an setelah Margaret Thatcher di Inggris (*Thatcherism*) dan Ronald Reagan (*Reaganomics*) di AS mengimplementasikan sistem ekonomi yang menempatkan kebebasan individu dan kompetisi bebas. Kemiskinan individu tidak lagi menjadi persoalan bagi negara dan dianggap lumrah akibat kompetisi. Hasilnya meningkatnya angka kemiskinan baik di Inggris maupun AS, namun mampu meningkatkan pendapatan yang sangat signifikan bagi para pemegang modal. Misalnya, di AS selama dekade 1980-an 10% teratas meningkatkan pendapatannya 16%; 5% teratas meningkatkan pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkatkan pendapatannya sebesar 50%. Hal ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah kehilangan pendapatan 15%.

Penyebarluasan neoliberal oleh AS mendapat momentumnya pada saat

krisis moneter di beberapa negara Amerika Latin dan Asia. Dengan dalih untuk membantu dampak krisis moneter, AS mempergunakan Bank Dunia dan IMF untuk memaksakan paket kebijakan ekonomi *Washington Consensus* (Konsensus Washington). Agenda pokok paket kebijakan itu meliputi kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan semua subsidi negara; liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, sektor pertanian dan privatisasi BUMN. Pintu masuk neoliberalisme ke negara dunia ketiga selanjutnya melalui jebakan hutang. Hutang diberikan secara terus menerus tanpa ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana hutang yang mengakibatkan pemerintahan nasional negara dunia ketiga menjadi kecanduan dan tidak berdaya menolak perubahan sistem ekonomi nasionalnya. Pada titik inilah pemilik modal internasional mengubah sistem ekonomi yang sudah ada menjadi sistem ekonomi yang sesuai dengan keinginan mereka dalam mengembangkan investasi dan keuntungan melalui: Pembukaan keran impor sebebaskan-bebasnya dan aliran uang yang bebas; Devaluasi; Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk pembatasan kredit, peningkatan

suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak dan kenaikan harga kebutuhan publik.

Penerapan agenda neoliberalisme di Indonesia dimulai sejak 1980-an melalui pemberlakuan paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Namun implementasi konsensus Washington secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pertengahan 1997. Indonesia mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. IMF pun memberlakukan jargon neoliberalisme: tidak ada sesuatu yang gratis termasuk untuk rakyat miskin. Selanjutnya IMF mengucurkan dana talangan yang dibutuhkan dengan mewajibkan penghapusan subsidi BBM (mendorong masuknya perusahaan multinasional retail BBM); Privatisasi BUMN (berpindahannya kepemilikan saham BUMN ke jaringan korporasi asing); liberalisasi sektor pertanian (menjadi pemicu tidak hanya kesengsaraan bagi petani, tetapi juga menyeret ketergantungan Indonesia pada korporasi asing dalam penyediaan pangan).

Sejak lama Indonesia yang kaya dan jumlah penduduknya yang besar

menjadi incaran kaum pemodal internasional. Penggulingan Soekarno dan naiknya Soeharto adalah bagian penting dari proses penguasaan Indonesia oleh kaum pemodal dan memberikan kesempatan kaum ini untuk mengeksploitasi alam dan manusia sebebas-bebasnya. Di sinilah timbul persoalan, mulai dari model pembangunan yang kurang tepat diterapkan hingga kontrol kapital dari negara-negara tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan ekonomi. Dampak liberalisasi pasar seringkali memarjinalkan petani-petani dari negara miskin yang tidak mampu bersaing. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun lebih banyak menguntungkan kaum pemodal. Krisis ekonomi di ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya pada tahun 1997 adalah anugerah pada kaum pemodal internasional karena membuka kesempatan seluas-luasnya pada IMF dan Bank Dunia untuk menata ekonomi di ASEAN dan Indonesia ke dalam tata ekonomi dengan sistem neoliberal. Dengan ditanda-tanganinya LOI oleh Soeharto dengan Presiden Bank Dunia maka mulai babak baru penguasaan ekonomi Indonesia sepenuhnya oleh kaum modal internasional, dan hal itu dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini.

Semua pemerintahan yang berkuasa dari masa Soeharto hingga masa SBY-JK (dan jika SBY terpilih kembali menjadi Presiden RI dalam Pilpres 2009) secara ekstrim barangkali bisa dikategorikan sebagai agen kepentingan kaum pemodal. Situasi politik pasca reformasi Mei 1998 hingga hiruk pikuk pertarungan politik saat ini boleh saja terjadi atas nama demokrasi, tetapi dinamika politik tersebut tidak mengganggu kepentingan kaum pemodal di Indonesia. Artinya bisa jadi para elite bertarung tetapi mereka semuanya tunduk kepada tuan yang sama, yaitu para pemilik modal. Di bawah pimpinan elit yang berkuasa selama ini Indonesia dikhawatirkan berjalan dengan pasti menuju jurang neoliberalisme. Semua agenda kaum modal diimplementasikan dengan cukup baik dan sigap oleh pemerintahan siapa pun yang akan berkuasa, termasuk juga kebijakan yang di negara asalnya sendiri pun hal tersebut masih enggan dilaksanakan oleh mereka (liberalisasi pertanian). Agenda-agenda neoliberal seperti privatisasi BUMN yang telah dilakukan dan mayoritas BUMN yang sebenarnya secara ekonomi sangat menguntungkan (misalnya indosat) telah dikuasai oleh modal asing.

Pencabutan subsidi dilakukan oleh seluruh pemerintahan yang berkuasa pasca reformasi, akibatnya adalah melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia. Program-program *lipstik* yang dibuat untuk mengantisipasi dampak pencabutan subsidi terbukti gagal mengatasi dampaknya. Liberalisasi pasar dilakukan dengan bangga oleh pemerintahan yang ada, kesulitan petani dalam memproduksi dan memasarkan hasil pertaniannya tidak pernah menjadi perhatian, impor beras menjadi kebijakan yang sungguh membanggakan. Lemahnya infrastruktur industri tekstil Indonesia juga tidak menjadi perhatian pemerintah dalam membuka Indonesia menjadi pasar tekstil. Penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh asing menjadikan pemerintahan nasional tidak punya kemauan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari hasil tambang yang dimiliki, pemerintahan Indonesia lebih konsen untuk membuat para investor nyaman mengeruk hasil bumi Indonesia tanpa ada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini hampir tiap bulan pasti ada pembukaan tambang batu-bara baru untuk wilayah Kalimantan dan semuanya itu untuk kesejahteraan kaum modal semata, dan rente bagi penguasa yang ada.

Utang luar negeri yang telah menjadi alat untuk memperlemah bangsa, ternyata tidak berani dimintakan pengurangannya oleh pemerintah. Akhirnya dana rakyatlah yang dikuras untuk membayar utang tersebut. Rencana penghapusan utang luar negeri bukan berarti pemerintahan SBY-JK dan mungkin pemerintahan yang akan datang akan berhenti berhutang. Neoliberal akan selalu merayu Indonesia agar selalu hidup dalam jeratan hutang. Regulasi investasi, yaitu membuat peraturan yang membuat investor nyaman berinvestasi seperti intensif pajak, membangun iklim investasi yang kondusif yang berarti keamanan yang terjamin, serikat buruh yang "ramah" serta sistem tenaga kerja yang fleksibel. Dari hal-hal tersebut tidak ada bukti lain yang membuat kita ragu bahwa pemerintahan yang telah berkuasa selama ini adalah pemerintahan yang semata-mata tunduk pada kepentingan kaum modal serta menjalankan agenda neoliberal di Indonesia.

Indikasi adanya hegemoni neoliberalisme adalah dominasi keuntungan oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang dan dunia ketiga dalam relasi ekonomi politik internasional, seringkali negara-negara

maju menggunakan lembaga Internasional (*unholy trinity*) seperti dalam bidang investasi pembangunan dunia melalui kedok Bank Dunia (*World Bank*), bidang keuangan moneter internasional dengan IMF dan bidang perdagangan melalui *World Trade Organization* (WTO). Hal ini dapat dilihat misalnya dari struktur keanggotaan dalam 184 negara anggota Bank Dunia, 150 negara berkembang di antaranya hanya memiliki kekuatan suara 33 persen. Sementara itu 34 negara maju di dalamnya memiliki kekuatan suara sebesar 67 persen suara hal ini menunjukkan dominasi struktur kepemilikan saham Bank Dunia, maka tidaklah mengherankan kebijakan yang lahir dari Bank Dunia, tidak lebih laksana korporasi raksasa yang melahirkan kebijakan "memfasilitasi" kepentingan pemegang saham terbesar. Mulai dari struktur kebijakan hingga penunjukan perusahaan rekanan Bank Dunia yang memiliki afiliasi terhadap negara maju.

Kebijakan penerapan pemberian utang berkedok bantuan luar negeri berupa proyek pembangunan maupun program kebijakan seringkali digunakan sebagai kontrol ekonomi dan politik negara maju terhadap negara

penerima bantuan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan Bank Dunia yang cenderung mendorong deregulasi, pencabutan subsidi ranah publik, perluasan pasar bebas, non proteksi, liberalisasi perbankan, regulasi dan liberalisasi birokrasi dan konstitusi (berbungkus program *good governance*) yang kesemuanya merupakan penerapan prinsip *Washington Consensus*.

Kebijakan moneter internasional yang dilakukan oleh IMF pada krisis yang menerpa Mexico dan Amerika Latin hingga krisis keuangan Asia pada akhir tahun 90'an, yang dalam hal ini Indonesia mengalami krisis terparah, dapat dijadikan contoh sangat relevan, bagaimana peran-peran negara maju (AS, Uni Eropa dan Jepang sebagai pemegang saham mayoritas IMF) mendorong kebijakan liberalisasi segala sektor. IMF dengan resep "mujarab" yang mematikan. Resep *Structural Adjustment Program* (SAP) atau dapat juga disebut sebagai program liberalisasi seluruh lini sektor-minimalisir peran negara, SAP diterapkan oleh IMF untuk atasi krisis moneter yang berkembang secara membabi buta, hingga menyebabkan krisis yang semakin berkelanjutan. □

## Referensi

- <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/liberalisasi-perdagangan>
- Harian Kompas Online Edisi 26 Mei 2008
- Galtung, Johan. 1980. *A Structural Theory of Imperialism*. (pp. 261-298) In: Ingolf and
- Anthony R. de Souza (Eds). *Dialectics of Third World Development*, Montclair, New York. Kevin Danaher, 2001, 10 Reasons to Abolish the IMF and World Bank , Global Exchange, Canada
- William K. Tab, 2006, *Tabir Politik Globalisasi*, Penerjemah: Uzair Fauzan dkk., Lafadl Pustaka, Yogyakarta
- Ivan A. Hadar, 2004, *Utang, Kemiskinan dan Globalisasi: Pencarian*
- Solusi Alternatif*, Lapera, Yogyakarta
- Francis Fukuyama, *State-Building: Governance and World Order in the 21<sup>st</sup> Century*, ( New York : Cornell University Press, 2004).
- Budi Winarno, 2005, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru*, TAJIDU Press, Yogyakarta
- Lyn H. Miller, 2006, terjemahan, penerjemah Daryatno, *Agenda Politik Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sri Edi Swasono, 2002, Paper, *Jati Diri Bangsa*, Pertemuan Alumni Akbar FE UNDIP, Semarang
- Revrisond Baswir, *Republik Utang*, [http://www.republika.co.id/kolom.asp? kat\\_id=15](http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=15)